

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN SISTEM PELAPORAN
TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN PANGALENGAN**

Djodi Setiawan

djodisetiawan130671@gmail.com

Husaeri Priatna

herieckall@gmail.com

Luvita Wulansari

luvitaw19@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur, yaitu untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis F untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini yaitu seluruh Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan sebanyak 13 desa serta sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang diambil dari masing-masing desa sebanyak 3 orang yang memiliki kriteria tertentu yaitu mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 65 responden.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa secara simultan dan parsial Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun hasil Koefisien Determinasi sebesar 54,5% dan sisanya sebesar 45,5% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah tetapi tidak diteliti. Adapun secara parsial Kejelasan Sasaran Anggaran lebih besar pengaruhnya daripada Sistem Pelaporan.

Kata kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah Desa

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan pemerintah desa tentunya mencapai kinerja yang lebih baik. Namun untuk mewujudkannya perlu didukung oleh anggaran yang tepat serta jelas sasarannya sesuai dengan program yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk menunjang terselenggaranya pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat, maka setiap Pemerintahan Desa harus menunjukkan kinerja yang baik seperti sarana dan prasarana yang memenuhi, aparat pemerintah desa yang harus sesuai dengan standar kompetensi, transparansi keuangan serta kejelasan sasaran anggaran sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Selain kejelasan sasaran anggaran, untuk menunjang kinerja yang lebih baik diperlukan sistem pelaporan keuangan dan penyelenggaraan program sesuai dengan standar serta aturan pelaporan yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu adanya sistem pelaporan yang mencakup indikator, metode, mekanisme, dan tata cara pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sebagai pengambil keputusan dan penanggungjawab tertinggi di dalam organisasi, manajer puncak mendelegasikan tugas dan kewenangan kepada manajer / pimpinan unit di bawahnya. Manajer / pimpinan unit yang menerima wewenang, mempertanggungjawabkan kewenangan dan tugas yang diterimanya, kepada pemberi wewenang.

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangalengan. Terdapat 13 pemerintah desa yang diteliti oleh penulis. Keingintahuan penulis untuk meneliti bagaimana kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah desa, hal ini bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa perlu adanya sasaran anggaran yang jelas untuk menunjang pembangunan di desa, yang didukung pula oleh sistem pelaporan yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila kedua hal tersebut dilaksanakan secara tepat maka dapat dikategorikan bahwa kinerja instansi pemerintah desa dapat dikatakan baik. Namun pada kenyataannya kinerja instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan rata-rata belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang sesuainya antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasinya, serta sistem pelaporan yang belum memenuhi standar.

dapat diketahui bahwa kondisi kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan di Pemerintahan Desa Kecamatan Pangalengan berdasarkan indikatornya rata-rata belum optimal / belum memenuhi. Hal ini penulis berasumsi bahwa kedua faktor ini dapat dikategorikan kinerja Pemerintahan Desa di kecamatan Kecamatan Pangalengan belum optimal, namun untuk membuktikannya perlu dilakukan analisis secara ilmiah dan mendalam, sehingga bagaimana pengaruhnya kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja, sebagaimana Kenis dalam Nadirsyah dan Gunawan menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Kemudian pengaruh sistem pelaporan terhadap kinerja dikemukakan oleh Bastian yang menyatakan bahwa pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja.

Teori di atas memperkuat peneliti bahwa kinerja instansi pemerintah desa dapat ditentukan oleh kejelasan sasaran anggaran yang tepat serta sistem pelaporan yang baik. Hal ini didukung pula oleh penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Imam Wahid pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam, bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan keduanya berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desadi Kecamatan Pangalengan|Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Luvita Wulansari

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pangalengan, dengan judul “**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa di kecamatan Pangalengan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan.
2. Bagaimana pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan.
3. Bagaimana pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan.

II. Kajian Pustaka

2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Abdul Halim (2012:22) anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk *finacial*, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Selanjutnya menurut Suharsimi (2010:1) bahwa anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Adapun pengertian kejelasan sasaran anggaran menurut Kenis dalam Nadirsyah, dkk (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

Yulianto (2019) mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

2.2 Pengertian Sistem Pelaporan

Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:2) adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya menurut Andri Kristanto bahwa sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama – sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Arifin dalam Umam (2014:174) mengemukakan bahwa, “Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan itu berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor.

Atmosudirdjo dalam Priansa (2017:239) mengemukakan bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data/informasi. Laporan sebagai salah satu produk kantor diperlukan oleh pimpinan organisasi.

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Indra Bastian (2013:297), pelaporan kinerja merupakan

refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

2.3 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah Desa

Prawirosentono (2008:2) berpendapat bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Baban Sobandi dkk (2006:176) bahwa Kinerja merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, maupun *impact*.

Menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:3) bahwa kinerja instansi pemerintah dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Adapun Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

III Objek Dan Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa. Adapun variabel bebas (*variabel independen*) dalam penelitian ini adalah Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan, sedangkan variabel terikat (*variabel dependen*) adalah Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan

pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menekankan pada data-data numerik (angka).

3.2.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan obyek atau subyek yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh Aparat Desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang tersebar di 13 desa. Kemudian sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive* yaitu sampel dipilih berdasarkan target dan tujuan tertentu atau sampel yang dipilih menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun alasan pemilihan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu Aparat Desa mulai dari pimpinan sebagai pengambil kebijakan, sampai bawahan yang mengetahui dan terlibat langsung dengan variabel yang diteliti antara lain :

1. Kepala Desa sebanyak 13 orang
2. Sekretaris Desa sebanyak 13 orang
3. Kepala Urusan, masing-masing 3 orang dari 13 desa : 39 orang

Jadi total sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 65 orang

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

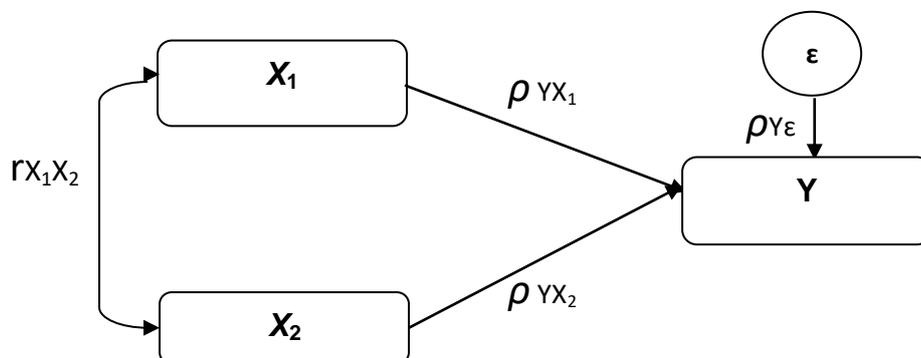
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun dari segi cara atau teknik, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dan gabungan ketiganya. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisisioner menggunakan skala likert.

3.2.3 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

3.2.3.1 Rancangan Analisis

Dalam memperoleh hasil penelitian, diperlukan adanya sebuah perancangan untuk melakukan analisis pada data yang telah dikumpulkan. Adapun rancangan analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis Jalur (*Path Analysis*).

sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2
Diagram Jalur (*Path Diagram*)

Keterangan :

- ρ = Koefisien Jalur antara variabel eksogen dan endogen.
- r = Koefisien korelasi
- Y = Variabel Endogen (akibat)
- X = Variabel Eksogen (penyebab)
- ε = Variabel Implisit (residu)

Dari gambar diagram jalur diatas, selanjutnya dibuat persamaannya sebagai berikut :

$$Y = \rho_{yx1}X_1 + \rho_{y2}X_2 + \dots + \rho_{yxk}X_k + \varepsilon$$

Sumber : Sugiyono (2017)

Untuk menghitung nilai yang ingin diperoleh dari diagram jalur serta persamaan diatas, maka digunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. Analisis Koefisien Korelasi

Rumus yang digunakan adalah rumus product moment digunakan sekaligus untuk mengetahui persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Sumber : Sugiyono (2017)

2. Koefisien Jalur

Menurut Sugiyono (2011:302) dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian, mengemukakan bahwa: "Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar (standar z) yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen yang telah tersusun dalam diagram jalur. Bilamana dalam diagram jalur terdapat dua atau lebih variabel, maka dapat dihitung koefisien parsialnya, dengan menggunakan data yang telah distandarkan atau dengan matrik korelasi".

3. Koefisien Determinasi :

$$Kd = r^2 . 100 \%$$

Sumber : Sugiyono (2017)

Dimana :

- Kd = Koefisien determinasi
- r^2 = Koefisien korelasi di kuadratkan.

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah :

1. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.

2. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

3.2.3.2 Pengujian Hipotesis

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis menurut sugiyono diringkas sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

- b. Menentukan hipotesis parsial antara variabel bebas Sistem Pelaporan terhadap variabel terikat Kinerja Instansi Pemerintah Desa

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa

- c. Menentukan hipotesis silmultan variabel bebas Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara bersama-sama terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta_3 = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif satu sama lain antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

$H_a : \beta_3 \neq 0$ Terdapat pengaruh positif satu sama lain antara Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

- d. Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n-k-1, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam status penelitian.

- e. Menghitung nilai t_{hitung}

Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah menggunakan rumus. Menurut Sugiyono (2014:187) dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, sebagai berikut :

$$t = \frac{r_p \sqrt{n - 3}}{\sqrt{1 - r_p^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2017)

Keterangan :

- r = Koefisien korelasi
- n = Banyaknya sampel
- t = Tingkat signifikan (t_{hitung})

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji dilakukan untuk melihat pengaruh variabel pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan perputaram kas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa. Untuk mengetahui apakah variabel independen keseluruhan mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikan tertentu. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis dengan uji F adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan hipotesis secara keseluruhan antara variabel bebas Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta_{1,2} = 0$ Tidak terdapat pengaruh positif Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

$H_a : \beta_{1,2} \neq 0$ Terdapat pengaruh positif Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa.

- b. Menentukan nilai signifikasi, yaitu 5% dengan derajat keberhasilan ($dk=k-1$) untuk mengetahui daerah F_{tabel} sebagai daerah batas penerimaan dan penolakan.

- c. Selanjutnya menghitung nilai F_{hitung} sebagai berikut :

Perhitungan F_{hitung} menurut Sugiyono dalam bukunya *Statistika Untuk Penelitian* (2014:192), sebagai berikut :

$$F_h = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Sumber : Sugiyono (2017)

Keterangan :

- R^2 = Koefisien korelasi ganda/simultan
- K = Jumlah variabel independen
- n = Jumlah anggota sampel
- dk = (n-k-1) derajat kebebasan.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien positif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ untuk koefisien negatif, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh)
- c. Jika nilai $F - Sig < \beta$ 0,5 maka H_0 ditolak.

Hasil analisis dan pengujian hipotesis, tingkat signifikannya adalah 5% ($\alpha = 0,05$) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95%, dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1. Koefisien Korelasi

Perhitungan koefisien korelasi menggunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment*, dilakukan guna mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel independen (X_1 dan X_2) yang diteliti. Berikut adalah hasil perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan Software SPSS versi 20 :

Tabel 1
Koefisien Korelasi Antar Variabel Independen (X)

		Correlations	
		X1	X2
X1	Pearson Correlation	1	.404**
	Sig. (2-tailed)		.001
	N	65	65
X2	Pearson Correlation	.404**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	
	N	65	65

Berdasarkan hasil output SPSS diatas, bahwa hubungan antara variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dengan Sistem Pelaporan (X_2) didapat nilai sebesar 0,404 sehingga apabila dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r (korelasi), berada pada daerah 0,40 – 0,599 artinya kedua variabel bebas mempunyai tingkat hubungan yang sedang dan positif. Dapat diasumsikan bahwa setiap Kejelasan Sasaran Anggaran meningkat maka akan meningkat pula Sistem Pelaporan, demikian juga sebaliknya..

2. Koefisien Jalur

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 20, diperoleh besaran koefisien jalur seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Nilai Koefisien Jalur
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.613	6.000		.102	.919
1 X1	.546	.114	.448	4.783	.000
X2	.569	.123	.433	4.620	.000

a. Dependent Variable: Y

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam penelitian ini yaitu pengaruh variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dan Sistem Pelaporan (X_2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa (Y). Perhitungan koefisien determinasi digunakan rumus sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien kuadrat korelasi ganda.

Dengan nilai R adalah sebesar 0,801 maka nilai koefisien determinasinya adalah sebagai berikut :

$$KD = 0,738^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,545 \times 100\%$$

$$KD = 54,5\%$$

Berikut adalah hasil output dengan menggunakan program SPSS versi 20 :

Tabel 3
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.738 ^a	.545	.530	7.044107

a. Predictors: (Constant), X2, X1

4. Pengaruh faktor lain / epsilon (ϵ) terhadap variabel terikat (Y)

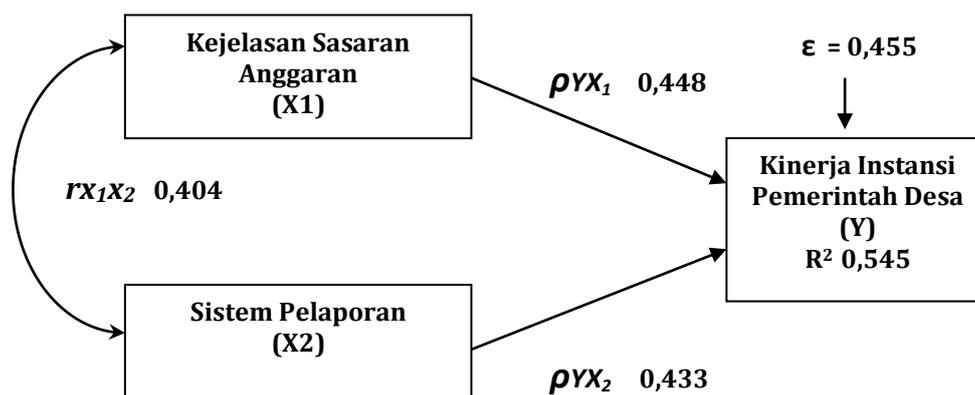
Pengaruh faktor lain / epsilon (ϵ) terhadap variabel terikat (Y) dapat dihitung dengan rumus :

$$\epsilon = 1 - R^2$$

maka :

$$\epsilon = 1 - 0,545$$

$$\epsilon = 0,455$$



Gambar 3
Hasil Analisis Jalur

Berdasarkan gambar tersebut di atas, maka diperoleh persamaan jalur sebagai berikut :

$$Y = 0,448X_1 + 0,433X_2 + \epsilon$$

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desadi Kecamatan Pangalengan|Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Luvita Wulansari

Dimana :

- Y = Kinerja Instansi Pemerintah Desa
 X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran
 X₂ = Sistem Pelaporan

Tabel 4
Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung Variabel bebas terhadap variabel terikat

Variabel	Kinerja Instansi Pemerintah Desa (Y)			
	Pengaruh Langsung	Pengaruh tidak langsung		
		X ₁	X ₂	Total
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	20,1%		7,8%	27,9%
Sistem Pelaporan (X ₂)	18,7%	7,8%		26,6%
Total Pengaruh (R ²)				54,5%
Epsilon / Faktor Lain (ε)				45,5%

Sumber : Hasil perhitungan MS Excel 2010

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terlihat bahwa :

- Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁) mempunyai pengaruh langsung sebesar 20,1%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Sistem Pelaporan (X₂) sebesar 7,8% sehingga total pengaruhnya adalah sebesar 27,9%.
- Variabel Sistem Pelaporan (X₂) mempunyai pengaruh langsung sebesar 18,7%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁) sebesar 7,8%, sehingga total pengaruhnya sebesar 26,6%.
- Hasil perhitungan Koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam persentase menggambarkan besarnya kontribusi semua variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X₁) dan Sistem Pelaporan (X₂) dalam menentukan Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 54,5%. Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah ditunjukkan oleh nilai epsilon (ε) = 0,455 atau sebesar 45,5%.

5. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka dilakukan uji signifikansi yaitu uji t (parsial) dan uji f (simultan) sebagai berikut :

1. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tabel 5
Hasil Uji-t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.613	6.000		.102	.919
1 X1	.546	.114	.448	4.783	.000
X2	.569	.123	.433	4.620	.000

a. Dependent Variable: Y

1) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa (Y)

Untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

a) Menentukan hipotesis parsial

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Pada tabel 5 di atas, nilai t-hitung untuk Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) adalah 4,783, pada t tabel dengan dk 62 ($n-3 = 65-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,999 (lihat t_{tabel} pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,783 > 1,999$) maka H_0 ditolak

b) Menentukan taraf signifikansi

Pada kolom sig. diatas (tabel 5) dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).

Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa (Y).

2) Pengaruh Sistem Pelaporan (X_2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa (Y)

a) Menentukan hipotesis parsial

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Pada tabel 5 di atas, nilai t-hitung untuk Sistem Pelaporan (X_2) adalah 4,620, pada t tabel dengan dk 62 ($n-3 = 65-3$) dan taraf signifikan 0,05 diperoleh 1,999 (lihat t_{tabel} pada lampiran). Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,620 > 1,999$) maka H_0 ditolak

b) Menentukan taraf signifikansi

Pada kolom sig. diatas (tabel 5) dapat dilihat nilai signifikansi uji-t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).

Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Sistem Pelaporan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa (Y).

2. Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Tabel 6
Hasil Uji-t

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3677.931	2	1838.965	37.061	.000 ^b
Residual	3076.406	62	49.619		
Total	6754.336	64			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

1) Menentukan hipotesis secara keseluruhan

Untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Dari tabel 6 di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 37,061 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 62

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desadi Kecamatan Pangalengan|Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Luvita Wulansari

dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 3,15 (lihat F_{tabel} pada lampiran). Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($37,061 > 3,15$) maka H_0 ditolak.

2) Menentukan taraf signifikansi

Dari tabel ANOVA^a diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).

Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dan Sistem Pelaporan (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa (Y).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran secara Parsial terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa Di kecamatan Pangalengan

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) mempunyai pengaruh langsung sebesar 20,1%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Sistem Pelaporan (X_2) sebesar 7,8% sehingga total pengaruhnya adalah sebesar 27,9%. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat Kejelasan Sasaran Anggaran, maka akan diikuti oleh peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, demikian pula sebaliknya. Kemudian hasil uji-t bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,783 > 1,999$) serta nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α ($0,000 < 0,05$), kemudian pada gambar daerah penolakan dan penerimaan H_0 , t_{hitung} berada pada daerah penolakan maka H_0 ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja sebagaimana menurut Indra Bastian (2013:297) bahwa pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja. Selanjutnya Kenis dalam Nadirsyah dan Gunawan (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Adanya pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Annisa Pratiwy Suwandi (2013), mengenai Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang), diperoleh hasil bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja.

Dengan demikian hasil penelitian pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan bahwa apabila semakin baik Kejelasan Sasaran Anggaran maka akan semakin semakin baik Kinerja Instansi Pemerintah, demikian pula sebaliknya.

4.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan secara Parsial terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa Di kecamatan Pangalengan

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa Sistem Pelaporan (X_2) mempunyai pengaruh langsung sebesar 18,7%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) sebesar 7,8%, sehingga total pengaruhnya sebesar 26,6%. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat Sistem Pelaporan, maka akan diikuti oleh peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, demikian pula sebaliknya. Kemudian hasil uji-t bahwa Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,620 > 1,999$) maka H_0 ditolak serta nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α ($0,000 < 0,05$), kemudian pada gambar daerah penolakan dan penerimaan H_0 , t_{hitung} berada pada daerah penolakan maka H_0 ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Sistem Pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 dinyatakan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian ini, setiap input yang ditetapkan dalam anggaran harus dapat diukur hasilnya dan pengukuran hasil bukan pada besarnya dana yang telah dihabiskan sebagaimana yang dilaksanakan pada sistem penganggaran tradisional (*line-item & incremental budget*) tetapi pada tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Adanya Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Mulyadi AR, Syamsidar, dan Dedy Efendy (2018) mengenai Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian hasil penelitian pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan bahwa apabila semakin baik Sistem Pelaporan maka akan semakin baik Kinerja Instansi Pemerintah, demikian pula sebaliknya.

4.2.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara Simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desa Di kecamatan Pangalengan

Berdasarkan hasil perhitungan Koefisien determinasi (R kuadrat) yang dinyatakan dalam persentase menggambarkan besarnya kontribusi semua variabel bebas yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dan Sistem Pelaporan (X_2) dalam menentukan Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 54,5%. Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah ditunjukkan oleh nilai epsilon (ϵ) = 0,455 atau sebesar 45,5%. Variabel lain dimaksud seperti faktor Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Karyawan, Teknologi Informasi, Kompensasi dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($37,061 > 3,15$) serta nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α ($0,000 < 0,05$), kemudian pada gambar daerah penerimaan dan penolakan H_0 bahwa F_{hitung} berada pada daerah penolakan, maka H_0 ditolak. Dengan demikian keputusan yang

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desadi Kecamatan Pangalengan|Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Luvita Wulansari

diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) dan Sistem Pelaporan (X_2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y).

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, peneliti dapat memahami bahwa secara bersama-sama apabila Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Pelaporan diterapkan dengan baik serta dilaksanakan secara tepat maka akan menentukan Kinerja Instansi semakin baik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan. Hal ini peneliti sampai ke pemahaman bahwa, secara realita kedua variabel ini masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan, apalagi jika keduanya secara bersama-sama dikelola serta diterapkan dengan baik maka akan meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh *Mulyadi AR, Syamsidar, dan Dedy Efendy* (2018) mengenai Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

V. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan. Dengan demikian Kejelasan Sasaran Anggaran memberikan kontribusi positif yang dapat menentukan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan, artinya semakin baik Kejelasan Sasaran Anggaran maka akan semakin baik Kinerja Instansi Pemerintah demikian pula sebaliknya.
2. Sistem Pelaporan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan. Dengan demikian Sistem Pelaporan memberikan kontribusi positif dalam menentukan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan artinya semakin baik Sistem Pelaporan maka akan semakin baik Kinerja Instansi Pemerintah demikian pula sebaliknya.
3. Secara simultan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh yang sedang, positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan. Dengan demikian Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara bersama-sama (simultan) memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, artinya semakin baik Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan maka akan semakin baik Kinerja Instansi Pemerintah demikian pula sebaliknya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang direkomendasikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan, dengan demikian Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan faktor pendukung dalam

meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan. Saran penulis, pihak pimpinan khususnya kepala desa beserta aparat desa harus selalu merencanakan anggaran secara jelas dan rinci, serta dialokasikan untuk kepentingan umum karena hal ini yang menentukan kinerja instansi pemerintah desa.

2. Sistem Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan, dengan demikian Sistem Pelaporan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan memberikan kontribusi positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Saran penulis, agar pemerintah desa khususnya bagian keuangan menerapkan sistem pelaporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan baik, karena hal ini yang menentukan kinerja instansi pemerintah desa.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan. Dengan demikian Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan ditentukan oleh faktor Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan, oleh karena itu penulis menyarankan agar pihak pimpinan khususnya kepala desa, serta sinergi dengan para aparat desa untuk selalu memperhatikan kedua faktor penentu Kinerja Instansi Pemerintah ini tetap baik dan optimal karena secara nyata kedua faktor ini menentukan secara signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pangalengan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut :
 - a. Apabila meneliti pada perusahaan sejenis, agar menambah variabel intervening, agar terdapat *outcomes* hasil penelitian. Misalnya variabel kesejahteraan masyarakat desa.
 - b. Menggunakan regresi linear berganda. Karena variabel bebas yang digunakan penulis memiliki hubungan (korelasi) jadi penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur. Namun apabila peneliti lain akan menggunakan regresi linear berganda, sebaiknya digunakan variabel bebasnya yang tidak memiliki hubungan (korelasi).

Daftar Pustaka :

- Arikunto, Suharsimi. (2020). Anggaran Perusahaan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, Abdul. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Indra Bastian. (2013). Sistem Akuntansi Sektor Publik, edisi 3, Jakarta: Salemba. Empat.
- Nadirsyah, M.Rizal Yahya, dan Gunawan Putra. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Aceh Tengah. Universitas Syiah Kuala. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 3 No.1. Tahun 2012
- Prawirosentono, Suyadi. 2008. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- Priansa, Donni Juni. (2017). Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Era Media. Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Desadi Kecamatan Pangalengan|Djodi Setiawan, Husaeri Priatna, Luvita Wulansari

- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. (2015). Sistem Informasi Akuntansi, Edisi. 13, alih bahasa : Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Jakarta: Salemba. Empat.
- Sholeh, *Chabib* dan *Suripto*. (2011). Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media.
- Sobandi, Baban dkk. (2006). Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung : Humaniora.
- Umam, Khaerul. (2014). Manajemen perkantoran : referensi untuk para akademisi dan praktisi. Cetakan pertama. Bandung : Pustaka Setia.
- Yulianto, Ahmad Rudi. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Vol.14, No 2.
- M.Rizal Yahya Nadirsyah dan Gunawan Putra. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Aceh Tengah. Universitas Syiah Kuala. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 3 No.1. Tahun 2012
- SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sumber : <https://monev.bps.go.id>.)
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.